

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terdapat dalam bab pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Gondokusuman karena masih terdapat pondokan yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan Pondokan dan masih banyak pondokan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman adalah melakukan penertiban terpadu sebanyak 6 kali dalam satu tahun bersama Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Kota Yogyakarta, namun apabila terdapat laporan dari warga sekitar terdapat pondokan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur seperti misalnya dalam satu bangunan pondokan dihuni oleh pemondok yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, Pondokan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pondokan, maka Satuan Polisi Pamong Praja

akan segera melakukan penertiban kepada pondokan ataupun pemondok yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Dalam kenyataan, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta bertindak pasif hanya menunggu datangnya laporan akibatnya dalam implementasi di lapangan banyak terjadi pelanggaran terutama perizinan pondokan.

B.Saran

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya rancangan peraturan daerah (raperda) pondokan. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan hanya memberikan sanksi kepada penyelenggara pondokan namun untuk pemondok yang melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan tidak diatur didalamnya.
2. Pihak Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya melakukan kerja sama dengan pihak RT/RW untuk melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

3. Satuan polisi pamong praja diharapkan lebih giat untuk melakukan penertiban di kecamatan Gondokusuman dikarenakan masih banyak pemilik pondokan dan pemonpok yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kamus :

- Anonim, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- J. Wajong, 1975, Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009 Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, NUANSA, Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Marsono, 1986, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah, Djambatan, Jakarta.
- Mr. Spelt, M.N dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, 1993, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sujatmo, 1984, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sri Pudyatmoko, Y, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Cetakan Pertama, PT Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 1988 tentang IMBB dan Ijin Penggunaan Bangunan-Bangunan, Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 14 Seri C

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan, Lembaran Daerah Nomor 1 tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 65 Seri D

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D

Peratura Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, Berita Daerah Kota Yogyakarta tahun 2013 Nomor 7

Internet :

Kecamatan Gondokusuman, <http://mapcarta.com/1648592>, diunduh tanggal 24 Februari 2015

Profil Kota DIY, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta>,
diunduh pada tanggal 24 februari 2015

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/info%20YOGYA%20%20Profil%20Kota%
20Yogyakarta.htm, diunduh pada tanggal 22 Mei 2015

[http://habibnurrahman.com/2009/headline/jogja/nama-kecamatan-dan
kelurahan-di-jogja/](http://habibnurrahman.com/2009/headline/jogja/nama-kecamatan-dan-kelurahan-di-jogja/) , diunduh pada tanggal 22 Mei 2015

